

**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Susur Sungai dan Pilah Sampah Peringati Hari
Peduli Sampah Nasional**



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/407847/dispera-kplh-susur-sungai-dan-pilah-sampah-peringati-hpsn>

Kandangan (ANTARA) - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Dispera KPLH HSS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan aksi bersama susur sungai dan pilah sampah pada Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024.

Kegiatan tersebut dirangkai membersihkan sungai dan menanam pohon di Kecamatan Loksado Kabupaten HSS.

"Aksi bersama kita mulai dengan penanaman pohon di halaman Masjid Al-Ettihad Loksado, dilanjutkan dengan susur sungai untuk membersihkan sampah plastik," kata Kepala Dispera KPLH HSS Ronaldy P Putra saat dikonfirmasi di Kandangan, Minggu. Ronaldy menjelaskan kegiatan pelestarian lingkungan tersebut sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2024 terkait HPSN 2024 dilakukan dengan gerakan serentak di seluruh Indonesia.

Aksi bersama didukung penggerak pariwisata dan lingkungan yang akan melaksanakan susur sungai termasuk dari "river tubing" dan penggerak lainnya.

"Ada sekitar 100 orang pegiat kita, dimulai dari daerah hulu banyu, melakukan pembersihan khususnya sampah-sampah plastik di bantaran sungai," tutur Ronaldy.

Penjabat Bupati HSS Hermansyah bersyukur dapat mengikuti pelaksanaan rangkaian peringatan HPSN berlokasi di wilayah Loksado.

Menurut dia, beberapa agenda telah dilaksanakan termasuk penanaman pohon untuk pelestarian alam dan tempat ibadah di kawasan Loksado.

"Ikut serta dalam aksi bersih-bersih sungai, bersama para relawan kebersihan, relawan pariwisata, semuanya kita turun untuk membersihkan sungai ini, yang merupakan kawasan hulu," jelasnya.

Ditambahkan dia, penanganan sampah harus secara terintegrasi, serta berharap momen HPSN menyadarkan seluruh elemen masyarakat terkait sampah tidak hanya menjadi bencana, tetapi juga menjadi nilai.

Sebelum pembukaan kegiatan susur sungai dan pilah sampah, Pj Bupati HSS menyerahkan satu kendaraan Tossa dan tempat ATM sampah plastik.

Selain Pj Bupati HSS, turut hadir juga Pj Ketua TP PKK Kabupaten HSS Rusnawati Hermansyah, dan turut dihadiri Sekda M Noor, pimpinan OPD, Camat Loksado, Danramil, serta kepala desa setempat.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/407847/dispera-kplh-susur-sungai-dan-pilah-sampah-peringati-hpsn>, 10 Maret 2024.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/03/10/hpsn-2024-pj-bupati-hss-ikut-bersih-bersih-sampah-di-sungai-amandit-loksado-bersama-relawan>, 10 Maret 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

c. sampah spesifik.

Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)

a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))

Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk

pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (!));
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.(Pasal 10 ayat (1))
- 4) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(Pasal 11)

5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

(Pasal 16)